

INTISARI

Penerapan tata kelola yang baik dalam perusahaan publik diharapkan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan tahunan demi kepentingan *stakeholders*. Namun penerapan tata kelola yang baik di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di Asia sehingga diperlukan peran pemerintah. Salah satu peran pemerintah yaitu Keputusan Ketua BAPEPAM-LK nomor KEP-431/BL/2012. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan perusahaan publik mengungkapkan laporan tata kelola pada laporan tahunan dengan transparan.

Obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang melakukan *listing* pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 50 perusahaan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tata kelola pada laporan tahunan perusahaan. Ternyata tidak seluruh perusahaan telah melakukan pengungkapan laporan tata kelola sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK sehingga dilakukan penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan tersebut terhadap peraturan. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan program SPSS.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen yaitu ukuran perusahaan, umur *listing*, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan dispersi untuk diuji pengaruhnya terhadap indeks kepatuhan pengungkapan tata kelola. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan tata kelola karena berdasarkan teori keagenan yaitu dewan komisaris semakin banyak, pengawasan dan pengendalian diharapkan akan menjadi lebih baik sehingga biaya keagenan akan menurun yang berdampak peningkatan kepatuhan terhadap pengungkapan tata kelola perusahaan.

Kata kunci : Tata Kelola, Teori Keagenan, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Umur *Listing*, Kepemilikan Dispersi, Transparansi.

ABSTRACT

The application of good governance in public companies are expected to increase transparency and accountability of the annual report in the interests of stakeholders. But the application of good governance in Indonesia is still poor compared to other countries in Asia so that the necessary role of government. One role of government is the Chairman's act of BAPEPAM-LK No. KEP-431/BL/2012. Depend on this rule, the company is expected to publicly disclose corporate governance report in the annual report with transparency.

Object of research is manufacturing company making listing on the Indonesia Stock Exchange by 50 companies using secondary data good governance report in the annual report of the company. But not all companies have made governance disclosure in accordance with BAPEPAM-LK so do some research to find the factors that affect the company's compliance with the regulations. Analysis of data using multiple regression using SPSS.

This study uses four independent variables are firm size, listing age, board size, and ownership dispersion to be tested influence on governance disclosure compliance index. This study shows that only the board size that significantly affect the governance disclosure compliance for the agency based on the theory that the bigger board size , supervision and control is expected to be better so that agency costs will decrease affecting the increase compliance with corporate governance disclosure.

Keywords: Good Governance, Firm Size, Listing Age, Board Size, Ownership Dispersion, Agency Theory, Transparency